



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comperhensive Starta 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

SKRIPSI



OLEH:
DESTRI YANI
NIM : 12270521482

PROGRAM S.1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU 2024/2025



UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi
NIM
Program Studi
Fakultas

Judul

Tanggal Ujian

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Destri Yani

: 12270521482

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Di Desa Bagan Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti

Tim Pengaji

Ketua Pengaji

Dr. Sitti Rahmah, M.Si

NIP. 19640508 199303 2 002

Pengaji I

Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos., M. Soc., Sc

NIP. 19830409 202321 1 016

Pengaji II

Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si

NIP. 19860604 202321 1 026

Sekretaris

Vina Museliza, S.E, M.Si

NIP.19660827 202321 2 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Destri Yani
: 12270521482
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Di Desa Bagan Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing

Dr. Muammar Alkadafi, S.Sos., M.Si
NIP. 19860604 202321 1 026

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

State Islam
EKAN
Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta di bawah ini
Nama Mahasiswa : **Zulfikar**
NIM : **2012100012**
Program Studi : **Sarjana Pendidikan**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan dan lain-lain yang wajar.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Nama : Destri Yani
NIM : 12270521482
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Jawa, 31 Desember 2002
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: "Analisis Kapasitas PEMERINTAH DESA DALAM MENGHARALKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADAS) DI DESA BAGAN MELIBUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



NIM : 12270521482

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK

OLEH:

DESTRI YANI
NIM : 12270521482

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Pemerintah Desa Bagan Melibur dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan sumber daya lokal, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi proses tersebut. Latar belakang penelitian didasari oleh rendahnya kemampuan sebagian besar desa di Indonesia dalam mengembangkan PADes secara mandiri, termasuk desa-desa di Kecamatan Merbau, yang masih bergantung pada dana transfer pemerintah. Desa Bagan Melibur memiliki potensi sumber daya lokal seperti pertanian sagu, usaha pakan ternak, serta peluang kerja sama dengan pihak swasta, namun kontribusinya terhadap PADes belum optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa pada level sistem, organisasi, dan individu telah terbentuk, namun belum berjalan maksimal. Faktor pendukung meliputi keberadaan regulasi, kerja sama dengan PT RAPP, dan potensi usaha lokal. Sementara itu, faktor penghambat mencakup keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya strategi pengembangan usaha desa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi BUMDes, serta pengembangan potensi lokal berbasis keberlanjutan.

Kata Kunci : Kapaistas, PADes, BUMDES



UIN SUSKA RIAU

©

ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT CAPACITY IN GENERATING VILLAGE ORIGINAL INCOME (PADes) THROUGH LOCAL RESOURCE MANAGEMENT IN BAGAN MELIBUR VILLAGE, KEPULAUAN MERANTI REGENCY

ABSTRAC

By:

DESTRI YANI
NIM : 12270521482

This study aims to analyze the capacity of the Bagan Melibur Village Government in generating Village Original Income (PADes) through the management of local resources, as well as to identify the supporting and inhibiting factors that influence this process. The background of this research is rooted in the limited ability of many villages in Indonesia to independently develop their PADes, including those in Merbau District, which remain dependent on government transfer funds. Bagan Melibur Village possesses various local potentials such as sago cultivation, livestock feed production, and opportunities for partnerships with private companies; however, their contribution to PADes has not been optimal. This study employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation techniques. The findings indicate that although the village government's capacity at the system, organizational, and individual levels exists, it has not functioned optimally. Supporting factors include the availability of regulations, cooperation with PT RAPP, and local business potential. Conversely, inhibiting factors consist of limited human resources, low community participation, and the absence of effective strategies for developing village enterprises. This study recommends strengthening the capacity of village officials, optimizing BUMDes operations, and developing sustainable local resource based programs.

Keywords: Capacity, Village Original Income (PADes), BUMDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **KeyWorda milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

AlhamdulillahiRobbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah melimpahkan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti.**". Selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa'ala aali sayyidina Muhammad.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun dengan adanya pihak-pihak yang mendorong serta memberikan motivasi kepada penulis baik langsung ataupun tidak langsung, moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Muammr Alkadafi, S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Terima kasih kepada diri sendiri karena sudah bertahan sejauh ini, Terima kasih pula untuk setiap air mata yang diam-diam jatuh namun tetap bertahan hingga menjadi tenaga untuk bangkit. Dalam perjalanan yang tidak selalu mudah, penulis telah melewati hari-hari yang penuh keraguan, kelelahan, dan rasa takut. Namun, meski sering merasa tidak mampu, penulis tetap memilih untuk melangkah. Di saat dunia terasa berat, penulis tetap berdiri dan mencoba lagi. Untuk semua kekuatan kecil yang tidak pernah terlihat oleh siapa pun, Semoga terima kasih ini menjadi pengingat bahwa penulis pernah berjuang habis-habisan. Untuk penulis, terima kasih sudah melakukan yang terbaik.
11. Teman seperjuangan penulis, Kelas D Angkatan 2022 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terkhusus Ria Rahma Dina, Viona Olivia, Nur Syifa Aulia Hasna, Mayang Pratini, Andien Nabilla Elfira, yang selalu memotivasi, dan selalu siap membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
12 Serta pihak yang pernah berjasra dikehidupan penulis yang tidak mampu
disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, 21 Juni 2025

Penulis

DESTRI YANI
NIM. 12270521482

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Maslah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Administrasi	10
2.2 Administrasi Pemerintah Desa	12
2.2 Kapasitas.....	13
2.3 Keuangan Desa.....	19
2.4 Faktor Pendukung & Penghambat Dalam Menghasilkan PADes	25
2.4 Penelitia Terdahulu.....	29
2.4.1 Definisi Konsep	32
2.5 Konsep Oprasional	35
2.6. Krangka Berfikir.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Jenis Dan Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5 Informan Penelitian	42
3.6Teknik Analisi Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Sejarah Desa Bagan Melibur	46
4.2 Visi Dan Misi Desa Bagan Melibur	47



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© Istiqamah UIN Suska Riau	
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian.....	56
5.1. Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa	56
5.2 Faktor Pendukung Dan Pengahambat Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa (Pades)	76
B. Pembahasan	107
5.1 Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa	107
5.2 Faktor Pendukung Dan Pengahambat Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa (Pades)	118
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	133
6.1 Kesimpulan.....	133
6.2 Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Keuangan Desa Kecamatan Merbau	3
Tabel 1. 2 Data Potensi Kecamatan Merbau	4
Tabel 1. 3 Data BUMDESA Kecamatan Merbau Tahun 2024.....	6
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin	50
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Di Desa Bagan Melibur	50
Tabel 4. 3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bagan Melibur	51
Tabel 5. 1 Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Tentang Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Pades) Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.....	58
Tabel 5. 2 Anggaran Dana Desa Bagan Melibur	61
Tabel 5. 3 Platihan Aparatur Desa Bagan Melibur	67
Tabel 5. 4 Tingkat pendidikan aparatur desa bagan melibur	70
Tabel 5. 5 Keterampilan Teknis Apartur Desa Bagan Melibur	73
Tabel 5. 6 Jumlah Usaha Berbasis Potensi Lokal Di Desa Bagan Melibur	77
Tabel 5. 7 Kontribusi Terhadap Pades	79
Tabel 5. 8 Berikut data bumdesa desa bagan melibur tahun 2023-2025	82
Tabel 5. 9 Jumlah pekerja BUMDES Melibur Jaya.....	86
Tabel 5. 10 Kerjaama Resmi Dengan Pihak Ke – 3.....	89
Tabel 5. 11 Jumlah nominal kerjasama dengan PT RAPP	91

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1	Anggaran Desa Bagan Melibur Dalam Rangka Mendukung Transparansi Kepada Masyarakat	59
Gambar 5. 2	Musdes Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa Bagan Melibur.....	62
Gambar 5. 3	Struktur Organisasi Desa Bagan Melibur.....	66
Gambar 5. 4	Platihan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	69
Gambar 5. 5	Keterampilan Teknis Aparatur Desa Dalam Penggunaan Teknologi Dan Kepemimpinan	75
Gambar 5. 6	Kebun Sagu Milik Desa Bagan Melibur	78
Gambar 5. 7	Proses Pembukaan Lahan Untuk Bumdes Ketahan Panagan Dan Monitoring Sapuring	81
Gambar 5. 8	Bumdes Sapuring Dan Pertahanan Pangan Pisang	84
Gambar 5. 9	Pekerja Bumdes Melibur Jaya.....	87
Gambar 5. 10	Penandatanganan Mou Antara Pihak Desa Dan Pt. Rapp Terkait Kerjasama Konsesus	90
Gambar 5. 11	Kegiatan Tabligh Akbar Yang Di Danai Oleh Hasil Kerjasama Konsesus.....	92
Gambar 5. 12	Aset Desa Yang Di Beli Menggunakan Hasil Kerjasama Konsesus	93
Gambar 5. 13	Bahan Baku Dalam Pembuatan Sapuring	100
Gambar 5. 14	Hasil Produksi Pakan Ternak Sapuring.....	104
Gambar 5. 15	Transportasi Menunju Pusat Kabupaten Kepulauan Meranti	107

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Salah satu bentuk kemandirian tersebut diwujudkan melalui kemampuan desa dalam menggali dan mengelola potensi ekonomi lokal guna menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes merupakan sumber pendapatan yang bersumber dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya masyarakat, dan lain-lain pendapatan sah yang ditetapkan dalam peraturan desa.(kemendagri, 2018).

Namun kenyataannya, sebagian besar desa di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Sementara kontribusi PADes terhadap total pendapatan desa masih tergolong rendah. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% desa masih sangat tergantung pada Dana Desa, dan PADes hanya menyumbang kurang dari 10% dari total pendapatan desa.(kementerian desa, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pemerintah desa dalam menghasilkan PADes belum optimal.Kapasitas pemerintah desa sendiri meliputi kemampuan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem tata kelola, serta kemampuan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan berbasis potensi lokal.(grindle, 1997). Sayangnya, masih banyak desa yang menghadapi hambatan seperti rendahnya kualitas aparatur, lemahnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manajemen aset desa, serta kurangnya pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara maksimal. Di sisi lain, setiap desa sejatinya memiliki potensi lokal yang bisa dikembangkan sebagai sumber PADes jika dikelola secara profesional dan partisipatif.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap kapasitas pemerintah desa dalam menghasilkan PADes, dengan tujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan desa dalam mengelola potensi ekonomi secara mandiri, faktor penghambat, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian fiskal desa.

Di Riau, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti, tantangan ini semakin terasa, di mana banyak desa belum mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan mereka. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kendala yang signifikan, mengakibatkan banyak desa tidak dapat merencanakan dan melaksanakan program-program yang efektif.

Salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah kecamatan Merbau, yang dikenal memiliki potensi unggulan di bidang pertanian, perikanan, minyak bumi, dan juga sektor pariwisata. Komoditas utama yang dikembangkan adalah sagu, yang menjadi ikon Kepulauan Meranti dan bernilai tinggi untuk kelestarian lingkungan dan ekonomi. Tentunya untuk memanfaatkan potensi tersebut di perlukan dukungan dana dari pemerintah dalam rangka mewujudkan salah satu aspek desa mandiri. Berikut data keuangan desa di kecamatan merbau :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 1

Data Keuangan Desa Kecamatan Merbau

No	Nama Desa	TRANSFER	PADes	PENDAPATAN LAN-LAIN		
		2025	2024	2023	2024	2025
1.	Meranti bunting	1.571.530.000	-	-	-	-
2.	Lukit	2.260.061.000	-	334.200.000	334.200.000	-
3.	Bagan Melibur	1.675.126.000	-	208.000.000	208.000.000	208.000.000
4.	Pelantai	1.573.349.000	-	-	-	-
5.	Tanjung Kulim	1.501.756.000	-	-	-	-
6.	Mekar Sari	1.758.144.000	-	-	-	-
7.	Mayang Sari	1.587.893.000	-	90.000.000	90.000.000	-
8.	Sungai Anak Kamal	1.638.285.000	-	-	-	-
9.	Sungai Tengah	1.605.272.000	-	-	-	-

Sumber : pemerintah desa kecamatan merbau

Berdasarkan table di atas dapat di lihat bahwa setiap desa di kecamatan merbau mendapatkan dana tranfer yang berasal dari anggaran dana desa (ADD) yang bersumber dari kabupaten, bantuan khusus keuangan (BKK) yang bersumber dari provinsi, dan Dana desa yang bersumber dari APBN pusat. Dengan nominal yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, angaka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan jumlah dana transfer terbesar di peroleh oleh desa lukit Rp. 2.260.061.000, kemudian di susul oleh desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mekar sari Rp. 1.758.144.000, Desa Bagan Melibur Rp.1.702.311.000, Desa Sungai Anak Kamal Rp. 1.638.285.000, Desa Sungai Tengah Rp. 1.605.272.000, Desa Mayang Sari Rp. 1.587.893.000, Desa Pelantai Rp.1.573.349.000, Dan dana transfer terkecil Desa Tanjung Kulim Rp.1.507.756.000. sedangkan table dana pendapatan asli desa (PADes) terlihat kosong karna belum mampunya desa yang ada dalam menciptakan kemandirian keuangan desa yang di sebut dengan PADes, sedangkan untuk pendapatan lain-lain yang sah dari sembilan desa yang ada seluruhnya mengandalkan dana transfer namun hanya tiga desa yang mampu menciptakan pendapatan lain-lain yang berasal dari PT. Riau Andalan Pulp And

Paper (RAPP) dengan nominal Desa Lukit Rp.334.200.000, Desa Bagan Melibur Rp. 208.000.000, dan Desa Mayang Sari Rp. 90.000.000. Namun di antara tiga desa tersebut hanya desa bagan melibur yang mampu mempertahankan dana yang berasal dari PT. RAPP tersebut. Adapun data potensi desa di kecamatan merbau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Potensi Kecamatan Merbau

NO	Nama Desa	Keterangan
1.	Meranti bunting	Perikanan
2.	Lukit	Pertanian, pariwisata, sagu & minyak bumi
3.	Bagan melibur	Pertanian,mangrove, sagu & minyak bumi
4.	Pelantai	Prikanan & mangrovr
5.	Tanjung kulim	Pertanian & sagu
6.	Mekar sari	Pertanian & sagu
7.	Mayang sari	Pertanian dan prikanan
8.	Sungai anak kamal	Pertanian & sagu
9.	Sungai tengah	Pertanian & sagu

Sumber : Website Kecamatan Merbau Bupaten Meranti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Merujuk pada data tersebut, dapat diketahui bahwa setiap desa memiliki kekayaan potensi wilayah yang beragam, di mana masing-masing desa menunjukkan keunggulan di sektor yang berbeda-beda, seperti perikanan, pertanian, sumber daya minyak bumi, hingga pariwisata. Yang seharusnya dimanfaatkan secara optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan desa. Namun, faktanya belum semua desa mampu memanfaatkan potensi tersebut. salah satu instrumen dalam menghasilkan PADes adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. UU Desa menegaskan kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan ekonomi desa, termasuk mendirikan BUMDes sebagai instrumen pengelolaan usaha melalui pemanfaatan potensi lokal dan aset desa yang dipisahkan. Pemerintah Desa berperan sebagai penentu kebijakan, pemilik aset, serta pelaksana pembinaan dan pengawasan, sedangkan BUMDes berfungsi sebagai pelaksana kegiatan usaha yang dikelola secara profesional dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui hubungan yang bersifat institusional dan fungsional tersebut, pengelolaan potensi dan aset desa dapat dilakukan secara produktif dan akuntabel, sehingga hasil usaha BUMDes berkontribusi langsung terhadap peningkatan PADes dan mendukung tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa. Adapun data BUMDESA adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 3**Data BUMDES Kecamatan Merbau Tahun 2025**

NO	Nama Desa	Keterangan
1.	Meranti Bunting	Batu
2.	Lukit	Tidak ada
3.	Bagan Melibur	Sapuring & pertahanan panagan pisang
4.	Pelantai	Pelabuhan
5.	Tanjung Kulim	Tidak ada
6.	Mekar Sari	Tidak ada
7.	Mayang Sari	Tidak ada
8.	Sungai Anak Kamal	Tidak ada

Sumber : Desa Kecamatan Merbau

Berdasarkan data di atas hanya tiga desa yang mampu menghasilkan BUMDESA dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Merbau, Yakni Desa Meranti Bunting, Desa Bagan Melibur Dan Desa Pelantai. Sedangkan enam desa lainnya belum mampu menciptakan BUMDESA di mana berdasarkan data potensi desa setiap desa memiliki potensi masing-masing, Dimana harusnya pemerintah mampu untuk mengoptimalkan setiap potensi yang ada.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi, serta variabilitas kapasitas antar desa dalam hal pengelolaan PADes. Dengan demikian, diperlukan suatu kajian ilmiah yang menganalisis secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis bagaimana kapasitas pemerintah desa terbentuk, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta strategi apa yang efektif diterapkan agar desa mampu mandiri secara fiskal melalui PADes.

Penelitian ini menjadi penting untuk:

1. Memberikan gambaran yang faktual dan teoritis mengenai kondisi aktual kapasitas pemerintah desa;
2. Menjadi bahan evaluatif bagi pemangku kebijakan desa dan daerah dalam merancang intervensi;
3. Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan desa yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi lokal.

Dengan analisis yang tepat, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mendorong tata kelola desa yang efektif dan berdampak pada peningkatan PADes serta kemandirian desa secara keseluruhan.

Dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu desa yang ada dikecamatan merbau yakni desa bagan melibur di karnakan desa tersebut memiliki pendapatan lain-lain secara konsisten selain bantuan dana transfer dari pemerintah serta letak geografis yang lebih dekat sehingga memudahkan di dalam melakukan penelitian. Adapun judul yang akan di teliti adalah "ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI"

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kapsitas pemerintah desa Bagan Melibur dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) melalui sumber daya lokal?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) di desa Bagan Melibur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kapsitas pemerintah desa Bagan Melibur dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) melalui sumber daya lokal.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) di desa Bagan Melibur

1.4 Manfaat Penelitian**a. Bagi Peneliti**

Penulisan penelitian ini bertujuan sebagai sarana untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menyusun karya ilmiah, serta menjadi kesempatan untuk menerapkan pengetahuan, konsep, dan teori yang telah dipelajari selama masa studi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

b. Bagi Instansi

Dengan penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih tidak hanya dari segi keilmuan, tetapi juga menawarkan solusi yang aplikatif bagi pemerintah desa dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mendorong terciptanya kemandirian fiskal di tingkat desa.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Pustaka

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur, sekaligus menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan riset lanjutan, khususnya yang berkaitan dengan analisis kapasitas pemerintahan desa dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pemanfaatan potensi sumber daya lokal, dengan fokus di Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Administrasi

Menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi, atau kegiatan penyusunan dan pencatatan data secara sistematis, baik di organisasi maupun perusahaan. Istilah ini juga dapat berarti sebagai tata usaha, yang merujuk pada kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan melalui kerjasama, kepemimpinan, dan pengawasan.

Menurut Kamaruddin Sellang administrasi adalah proses pengorganisasian dan pengelolaan kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai ilmu, administrasi berkembang berdasarkan prinsip-prinsip universal, tetapi dalam praktiknya harus disesuaikan dengan konteks lokal. Terdapat tiga unsur pokok dalam administrasi: kerja sama yang melibatkan lebih dari satu individu, tujuan yang ingin dicapai, dan pengaturan yang sistematis. Administrasi mencakup fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Pemahaman yang baik tentang administrasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi dan pelayanan publik.(Sellang 2019)

Menurut The Liang Gie (1980:9) yang dikutip dari buku ajar teori administrasi “Secara umum, administrasi dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok individu dalam suatu sistem kerja sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam konsep administrasi, terdapat tiga aspek utama. Pertama, administrasi sebagai suatu seni merupakan suatu proses yang memiliki titik awal yang jelas, namun tidak memiliki batas akhir yang pasti. Kedua, administrasi melibatkan beberapa komponen penting, seperti keterlibatan minimal dua orang atau lebih, tujuan yang hendak diwujudkan, tugas atau serangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan, serta perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas tersebut—yang meliputi unsur waktu, tempat, bahan, dan komponen pendukung lainnya. Ketiga, administrasi sebagai proses kerjasama yang telah ada sejak manusia ada. (Warsono, Astuti, dan Marom 2019).

Sedangkan nilai-nilai administrasi yang dikemukakan oleh Max Weber yang di tuliskan kembali di dalam buku “ teori administrasi publik” yaitu :

- 1) Adanya Pembagian Kerja. Dibaginya pekerjaan berkaitan dengan keahlian masing-masing pekerjanya.
- 2) Adanya Hierarki Posisi. Masing-masing kedudukan yang dibawah dikendalikan serta dilakukan pengawasan oleh pegawai-pegawai level atas.
- 3) Aturan Formal dan Regulasi. Melakukan pengaturan pada tindakan pegawai secara menyeluruh, memberikan penjaminan berlangsungnya serta stabilnya kawasanpekerjaan, serta melakukan pengurangan pada tidak pastinya kemampuan pekerja.
- 4) Hubungan yang Impersonal. Tak terdapat hal yang mengikat emosi pada bawahan serta atasan hingga memberikan penjaminan tentang jelasnya kedudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Kemampuan yang spesifik serta pelatihan adalah standard yang paling pokok dari posisi administrasi. Hal tersebut berhubungan pada terdapatnya standar-standar yang menyeleksi secara pasti serta tak diangkat serta dihentikan dengan semena-mena.
- 6) Memperkerjakan karyawan berdasarkan kompetensi. Berdasarkan faktanya, hal itu sering dilaksanakan kemudian menyediakan lowongan-lowongan, jika kemampuan karyawan yang sudah dipilih tak bisa menjalankan pekerjaannya maka harus dilatih ataupun diberi pembekalan dulu sehingga dapat lebih laik lagi. (Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi 2023).

2.2 Administrasi Pemerintah Desa

Administrasi pemerintah desa berdasarkan KBBI adalah proses pencatatan dan pengelolaan data serta informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa adalah wilayah kesatuan masyarakat hukum yang punya pemerintahan sendiri. Istilah administrasi di sini mencakup administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan lainnya, yang bertujuan menata usaha kerjasama untuk mencapai tujuan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 mengenai pedoman administrasi desa, Administrasi Desa mencakup seluruh proses pencatatan data dan informasi terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Buku Administrasi Desa. Jenis dan bentuk administrasi desa meliputi Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan, Administrasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

serta Administrasi lainnya.Kemudian Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Menteri Dalam Negeri 2013)

Suwignyo (1985) mengemukakan dalam .(Fitriana 2014) bahwa agar penyelenggara pemerintah desa dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka perlu dilakukan pemberdayaan Aparat pemerintah Desa antara lain melalui :

1. Bimbingan latihan kerja, yaitu pemberian bimbingan kepada aparat pemerintah Desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang berhubungan dengan administrasi Desa, bimbingan cara-cara pengisian registrasi Desa, penyusunan APBDES, penyusunan peraturan Desa, pengelolaan keuangan Desa yang akuntabel, dan lain-lain.
3. Peningkatan penghasilan/honorarium, yaitu agar aparat pemerintah Desa mempunyai gairah kerja, semangat kerja, dan yang yang lebih penting adalah para aparat pemerintah Desa dapat hidup layak.
4. Melengkapi sarana dan prasarana kerja, yaitu perlunya melengkapi sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah Desa agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

2.2 Kapasitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kapasitas adalah "kemampuan berproduksi" atau "daya serap". Dalam konteks organisasi, kapasitas organisasi berarti kemampuan keseluruhan organisasi untuk beroperasi dan mencapai tujuannya, yang mencakup aspek kemampuan, keterampilan, sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya, dan kondisi yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara efektif.

UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1999 mendefinisikan Capacity building merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok, organisasi, institusi, maupun masyarakat dalam menjalankan perannya, termasuk dalam mengatasi persoalan serta meraih tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemahaman ini, pembangunan kapasitas dapat dikaji melalui tiga level utama, yakni: level sistem, level organisasi, dan level individu. Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang erat. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses analisis terhadap kapasitas yang dimaksud. Pada level sistem, kapasitas diukur dari terciptanya lingkungan yang mendukung (enabling environment), yakni sejauh mana sistem mampu memberikan dukungan kepada komponen-komponen di dalamnya agar bisa berjalan secara optimal, efisien, serta berkelanjutan. Pada level organisasi atau institusi, fokus pengukuran kapasitas terletak pada berbagai faktor internal yang menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan. Sedangkan di level individu, perhatian difokuskan pada kemampuan personal dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga atau organisasi.(Kanni 2009).

Maka dari itu, berdasarkan pendapat di atas peneliti memiliki beberapa sub indikator yang dapat mendukung indikator yang dikemukakan oleh UNDP, sebagaimana yang peneliti ungkapkan di bawah ini:



1. Level sistem

Pada level sistem, kapasitas diukur dari terciptanya lingkungan yang mendukung (enabling environment) yang memungkinkan seluruh komponen dalam sistem dapat berfungsi secara optimal, efisien dan berkelanjutan. Indikator utama pada level ini adalah kemampuan sistem dalam menyediakan dukungan struktural yang memadai seperti .

a. keberadaan regulasi yang mendukung, regulasi yang mendukung mencakup peraturan, kebijakan, dan standar yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan konsisten bagi seluruh komponen system. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman operasional dan memastikan bahwa semua pihak menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Contohnya adalah undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan sektoral yang mengatur tata kelola, standar kualitas, dan prosedur kerja.

b. Alokasi sumber daya yang memadai, Alokasi sumber daya mencakup penentuan dan distribusi dana, tenaga kerja, waktu, dan bahan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dalam sistem. Sumber daya yang memadai memastikan bahwa setiap komponen sistem memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Ini juga termasuk pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Level Organisasi

Pada level organisasi kapasitas di ukur berdasarkan faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Indikator utama adalah efektivitas manajemen dan struktur organisasi dalam menjalankan fungsi dan mencapai tujuan seperti .

a. Adanya struktur organisasi, Struktur organisasi yang jelas berarti adanya pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang terdefinisi dengan baik dalam organisasi. Hal ini mencakup hierarki jabatan, garis pelaporan, serta unit atau departemen yang spesifik sesuai fungsi masing-masing. Struktur yang jelas memudahkan koordinasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan tugas secara efisien tanpa tumpang tindih atau kebingungan peran.

b. Pengembangan sumber daya manusia, adalah proses meningkatkan kemampuan individu, organisasi, dan sistem agar mampu menjalankan fungsi, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, UNDP menekankan bahwa peningkatan kapasitas bukan hanya tentang pelatihan, tetapi meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta lingkungan pendukung yang memungkinkan individu berkembang secara optimal.

3. Level Individu

Pada level ini kapasitas difokuskan pada kemampuan personal dan kontribusi individu terhadap pencapaian tujuan lembaga atau organisasi. Indikator utama adalah kompetensi dan motivasi individu dalam melaksanakan tugasnya seperti .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- a. Tingkat pendidikan yang dimiliki, ini mengacu pada jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh seseorang, seperti sekolah, diploma, sarjana, atau pendidikan lanjutan lainnya. Selain itu, pelatihan khusus yang diikuti untuk meningkatkan kompetensi juga termasuk di sini. Pendidikan dan pelatihan yang baik biasanya meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis seseorang dalam bidang pekerjaannya.
 - b. Keterampilan Teknis, adalah kemampuan praktis yang berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan, misalnya mengoperasikan mesin, menggunakan perangkat lunak tertentu, atau menguasai teknik khusus dalam suatu bidang.

Milen mengemukakan dalam jurnal yang ditulis oleh Yuswijaya memberikan definisi kapasitas sebagai berikut: "Kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dengan cara yang efisien, efektif, dan berkelanjutan." Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas, terdapat tiga tingkatan (level) yang perlu menjadi perhatian dalam analisis dan proses perubahan di dalam suatu organisasi. Ketiga tingkatan tersebut meliputi tingkat sistem atau kebijakan, tingkat organisasi atau lembaga, dan tingkat individu atau sumber daya manusia.(Yuswijaya 2004)

Sementara itu, dengan mengacu pada definisi capacity building yang disampaikan oleh Katty Sessions, (Rasmala, K., & Mursak 2014) menjelaskan bahwa sesungguhnya terdapat tiga elemen dasar dalam pembangunan kapasitas sebagai berikut: pertama, Aktor yang akan dibangun. Pada intinya menunjuk pada dua aktor utama, yaitu individu (personal) dan organisasi (kelembagaan). Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti bahwa objek dari pembangunan kapasitas sesungguhnya dapat berupa orang-perorangan maupun lembaga. Ke-dua, Elemen yang akan dibangun. Ini dapat mencakup dua aspek pokok, yaitu keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan baik keahlian individual maupun organisasional. Ke-tiga, Metode atau cara yang digunakan. Ini menyangkut berbagai cara, seperti pendidikan dan pelatihan, reformasi kelembagaan dan peraturan, asistensi keuangan, keilmuan pengetahuan, dan teknologi.

Selain itu menurut Yeremias T. Keban (1999:75) dalam (Rasmala, K., & Mursak 2014) lebih khusus dalam bidang pemerintahan berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada pengembangan dimensi, sumber daya manusia, penguatan organisasi; dan reformasi kelembagaan atau lingkungan.

Teori kapasitas menurut salhuddin mengacu pada kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, terutama dalam konteks otonomi desa yang diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Penulis menekankan bahwa kapasitas ini mencakup aspek sumber daya manusia, manajemen administrasi, dan pengelolaan keuangan yang memadai. Meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan yang luas, banyak desa menghadapi tantangan seperti minimnya kapasitas SDM dan keterbatasan anggaran, yang menghambat implementasi kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas melalui pelatihan, dukungan sumber daya, dan penggunaan teknologi informasi, seperti e-government, dianggap krusial untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektivitas pemerintahan desa dan mencapai tujuan pembangunan yang berdaya saing.(Salahudin 2016)

Menurut Asrori (2014) dalam Triandani et al. (2022), terdapat tiga jenis kompetensi yang perlu dimiliki oleh aparatur desa, yakni: 1) kompetensi dasar, 2) kompetensi manajerial, dan 3) kompetensi teknis. Kompetensi dasar mencakup pemahaman terhadap peraturan-peraturan desa, prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan desa, serta penguasaan terhadap tugas dan fungsi utama yang diemban. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya manusia, pelayanan kepada masyarakat, aset desa, serta keuangan desa. Sementara itu, kompetensi teknis meliputi keahlian dalam menyusun administrasi pemerintahan desa, merancang rencana pembangunan, menyusun anggaran, merumuskan peraturan desa (Perdes), serta melaksanakan pelayanan publik secara efektif.

2.3 Keuangan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa mencakup berbagai sumber pendapatan yang digunakan untuk menyokong pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Adapun sumber keuangan desa terdiri dari berbagai komponen yang penting untuk mendorong penciptaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berikut adalah sumber-sumber keuangan desa menurut UU ini:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
3. Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Dana Desa
4. Bantuan Keuangan:
5. Hibah dan Sumbangan:

Permendagri No. 18 Tahun 2020 mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan memberikan penjelasan lebih rinci mengenai sumber pendapatan desa. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai sumber pendapatan desa berdasarkan peraturan tersebut:

1. Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:Pembangunan infrastruktur desa (jalan, jembatan, sarana air bersih, dll.)Program pemberdayaan masyarakat (pelatihan, pengembangan usaha, dll.) Kegiatan sosial dan budaya.

2. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber yang dikelola secara mandiri. PADesa mencakup:Hasil Usaha Desa: Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh desa, seperti pengelolaan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).Sewa Aset Desa: Pendapatan dari penyewaan aset desa, seperti tanah, bangunan, atau fasilitas lainnya.Retribusi: Pendapatan dari retribusi yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh desa kepada masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ADD bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Penggunaan ADD harus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah desa.

4. Bagian dari Pajak dan Retribusi Daerah

Desa juga berhak mendapatkan bagian dari pajak dan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ini termasuk:

Pajak Daerah: Sebagian dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB).

Retribusi Daerah: Bagian dari retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah yang dialokasikan untuk desa.

5. Sumber Lain yang Sah

Selain sumber-sumber di atas, desa juga dapat memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah, seperti:

Sumbangan atau Donasi: Bantuan dari individu, organisasi, atau lembaga yang bersifat sukarela.

Kerjasama dengan Pihak Ketiga: Kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lain dalam bentuk proyek atau program yang saling menguntungkan.

Permendagri No. 60 Tahun 2014 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengatur tentang Dana Desa. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai peraturan ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Dana Desa: Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh. masyarakat desa dan mempercepat pembangunan desa. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mendukung pembangunan desa.
2. Sumber Dana: Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk desa-desa di seluruh Indonesia.
3. Pengelolaan Dana: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2014 memberikan pedoman mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Setiap proses pengelolaan dana tersebut wajib dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Prioritas Penggunaan: Dana Desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, pemanfaatannya harus mengacu pada hasil kesepakatan yang diperoleh melalui forum musyawarah desa.
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Desa yang menerima Dana Desa memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan anggaran dan mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pihak pemerintah. Langkah ini bertujuan agar penggunaan dana benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Monitoring dan Evaluasi: Permendagri ini juga mengatur tentang pentingnya monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya.

Pengelolaan sumber pendapatan desa harus dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam pengelolaan tersebut, di antaranya:

1. Keterbukaan Informasi: Seluruh proses pemasukan dan pengeluaran keuangan desa harus disampaikan secara terbuka kepada warga desa.
2. Tanggung Jawab Keuangan: Para pengelola dana desa wajib bertanggung jawab atas penggunaan anggaran serta harus mampu menjelaskan setiap pengeluaran yang dilakukan.
3. Keterlibatan Warga: Proses penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan desa perlu melibatkan masyarakat melalui forum musyawarah desa guna menetapkan prioritas penggunaan dana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa poin utama:

1. Tahap Perencanaan: Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus berlandaskan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
2. Keterlibatan BPD: BPD (Badan Permusyawaratan Desa) berperan aktif dalam forum musyawarah desa untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tahap Pelaksanaan: Kepala Desa memiliki wewenang sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan anggaran desa. Pengeluaran anggaran dilaksanakan sesuai dengan dokumen resmi yang telah disetujui, seperti Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
4. Penatausahaan: Mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur Keuangan bertanggung jawab atas penatausahaan dan pelaporan keuangan.
5. Penyampaian Laporan: Kepala Desa memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Wali Kota serta kepada warga desa. Laporan tersebut memuat rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja, beserta uraian kegiatan yang telah dijalankan.
6. Pertanggungjawaban: Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap akhir tahun anggaran. Termasuk laporan keuangan dan kegiatan yang terkait dengan APB Desa.
7. Pengawasan: Pengelolaan keuangan desa diawasi oleh pemerintah daerah dan aparat pengawas internal. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik harus berdasarkan atas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan efektivitas pemerintahan desa.

Berdasarkan isi jurnal ini, pengelolaan keuangan desa mencerminkan seluruh proses yang berhubungan dengan pengelolaan sumber dana serta aset desa, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan program, pengelolaan

© Hak Cipta milik INSTITUT
SAINS
dan
TEKNOLOGI
SULTAN
SUSKA
RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi, penyusunan laporan, hingga proses akuntabilitas akhir keuangan desa. Dana desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa.(Losung et al. n.d.)

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka dan transparan, serta akuntabel dan partisipatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan dana desa dapat berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa.Jadi, secara garis besar, keuangan desa dalam jurnal ini diartikan sebagai seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh desa, Kegiatan ini mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pendokumentasian, penyusunan laporan, serta pertanggungjawaban atas dana desa yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Seluruh tahapan tersebut wajib dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas., guna mendorong tercapainya pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa secara optimal dan efisien.(Madyan, Prihantono, dan Aisyah 2020)

2.4 Faktor Pendukung & Penghambat Dalam Menghasilkan PADes

Faktor pendukung adalah kondisi yang menunjang atau mendorong suatu kegiatan, sedangkan faktor penghambat adalah kondisi yang menghalangi atau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperlambat jalannya suatu kegiatan. Dalam konteks KBBI, ini merujuk pada kondisi yang memfasilitasi atau mengganggu penggunaan dan perkembangan.

Dr. Gunawan Sumodiningrat, seorang pakar ekonomi pembangunan di Indonesia, dalam tulisannya tahun 2007 menekankan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat berkembang secara signifikan melalui penguatan ekonomi lokal berbasis kerakyatan. Pendekatan ini melibatkan pemanfaatan sumber daya lokal, peran sentral Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan kolaborasi dengan swasta. Menurutnya, faktor pendukung berfokus pada elemen-elemen yang memperkuat potensi desa, sementara faktor penghambat sering kali bersumber dari keterbatasan internal dan eksternal masyarakat desa. Berikut penjelasan rinci poin-poin faktor pendukung dan penghambat (Gunawan Sumodiningrat 2007)

1. Faktor Pendukung

- a. Usaha berbasis potensi lokal. Menurut Dr. Sumodiningrat, faktor ini menjadi fondasi utama karena sumber daya lokal (seperti pertanian, kerajinan, atau pariwisata desa) dapat diubah menjadi kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Di desa-desa Indonesia yang kaya akan potensi alam, seperti sawah di Jawa atau hutan di Sumatra, pengembangan ini melibatkan identifikasi dan pemanfaatan aset lokal untuk produksi barang/jasa, seperti pengolahan kopi organik atau homestay berbasis budaya. Hal ini mendukung PADes melalui peningkatan pendapatan dari penjualan produk, yang pada akhirnya memperbesar basis pajak dan retribusi desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Keaktifan bumdes

BUMDes disebut sebagai "motor penggerak" karena perannya dalam mengelola usaha desa secara profesional BUMDes yang optimal dapat menjadi pusat koordinasi sumber daya, sehingga mempercepat pertumbuhan PADes. Penjelasan panjang: BUMDes bukan sekadar koperasi desa, melainkan entitas bisnis yang mengintegrasikan modal desa dengan inisiatif warga, seperti mendirikan pasar tradisional atau unit pengolahan hasil tani. Optimalisasi ini mencakup peningkatan manajemen, teknologi sederhana, dan diversifikasi usaha, yang menghasilkan dividen bagi desa.

c. kerjasama dengan pihak swasta

Kalaborasi dengan pihak dengan swasta dianggap krusial untuk membawa investasi dan keahlian eksternal ke desa kemitraan ini harus strategis agar mendatangkan manfaat ekonomi nyata, seperti transfer teknologi atau akses pasar.

2. Faktor Penghambat

- a. keterbatasan internal masyarakat adalah kelemahan atau hambatan yang berasal dari dalam diri masyarakat sendiri yang menyebabkan mereka sulit berpartisipasi, sulit berkembang, dan kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki.Keterbatasan ini muncul karena rendahnya kapasitas manusia dan minimnya modal sosial yang seharusnya menjadi kekuatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Akses terhadap modal, kemampuan masyarakat khususnya kelompok ekonomi lemah dan pelaku usaha kecil untuk memperoleh sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan yang diperlukan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

Semangat/inisiatif usaha masyarakat, merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi berbasis rakyat. Menurutnya, desa hanya dapat berkembang apabila masyarakat memiliki kemauan, keberanian, dan inisiatif sendiri untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif.

d. Regulasi dan pasar, pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat hanya dapat berlangsung apabila regulasi pemerintah memberikan ruang, perlindungan, dan keberpihakan, sementara pasar menyediakan akses yang adil bagi pelaku kecil, mikro, dan masyarakat desa.

Dalam penelitian (Cisan et al. 2021) Faktor pendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi tersedianya sumber daya alam dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi tersebut, serta dukungan modal dan fasilitas dari pemerintah desa untuk unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program pelatihan dan pembinaan juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya kesadaran dan komitmen pengurus BUMDes, koordinasi yang lemah antara pemerintah desa dan masyarakat, serta ego individu yang menyebabkan beberapa pengurus lebih mementingkan kepentingan pribadi. Dengan memperkuat faktor pendukung dan mengatasi penghambat, desa dapat secara signifikan meningkatkan PAD, yang berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) mengutip dari (Hardiana, Idris, dan Dama 2018) Faktor pendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Desa Mansalong mencakup pemungutan retribusi pasar yang berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, serta pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menciptakan peluang usaha baru. Alokasi dana desa yang baik juga mendukung pelaksanaan program pembangunan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang ada, kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang mengakibatkan kesalahanpahaman, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Dengan memperkuat faktor pendukung dan mengatasi penghambat, Desa Mansalong dapat meningkatkan PAD secara signifikan, yang berdampak positif pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Persamaan & Perbedaan
1	Ramadhan , S., & Sudaryanto, A.	2023	Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Optimalisasi Potensi Lokal di Desa	Penelitian ini memiliki persamaan karena berfokus pada strategi peningkatan PADes melalui optimalisasi potensi lokal, yang selaras dengan upaya pengelolaan sumber daya lokal. Namun, penelitian ini tidak secara spesifik menganalisis kapasitas pemerintah desa secara mendalam, melainkan lebih menyoroti strategi umum.

<p style="text-align: center;">© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p style="text-align: center;">State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<p>Kurniawan, D., & Suryono, A.</p> <p>Santoso, B., & Cahyono, E.</p> <p>Indrawati, R., & Susilo, J.</p> <p>Utami, L., & Wijoyo, S.</p>	<p>2022</p> <p>2021</p> <p>2020</p> <p>2019</p>	<p>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Sektor Pariwisata untuk Peningkatan Pendapatan Asli Desa</p> <p>Identifikasi Potensi Ekonomi Lokal dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Desa di Kabupaten Y</p> <p>Analisis Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Desa</p>	<p>penelitian ini mengkaji pengelolaan sumber daya lokal (melalui BUMDes) dan dampaknya terhadap PADes. Perbedaannya terletak pada fokus utamanya yang adalah BUMDes, bukan keseluruhan kapasitas pemerintah desa dalam konteks pengelolaan sumber daya lokal yang lebih luas.</p> <p>Penelitian ini menyoroti peran pemerintah desa dalam mengelola sumber daya lokal (pariwisata) untuk PADes. Akan tetapi, fokusnya terbatas pada sektor pariwisata, sementara tema penelitian saya mencakup sumber daya lokal yang lebih beragam.</p> <p>Ada persamaan karena penelitian ini mengidentifikasi potensi sumber daya lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desa, yang secara tidak langsung mendukung peningkatan PADes. Perbedaannya, penelitian ini lebih berfokus pada identifikasi potensi dan kemandirian secara umum, bukan analisis kapasitas pemerintah desa secara spesifik dalam pengelolaan potensi tersebut.</p> <p>Penelitian ini relevan karena mengkaji kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan sumber daya. Namun, cakupannya lebih luas pada pengelolaan keuangan dan sumber daya desa secara umum, tidak spesifik berfokus pada hubungannya dengan PADes.</p>
---	--	---	---	---	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau	Tahun Publikasi	Judul Penelitian	Ringkasan Penelitian
6	Hartono, R., & Supriyanto, T.	2023	Dampak Inovasi Kebijakan Lokal Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Era Digital	Penelitian ini membahas upaya peningkatan PADes dan inovasi di tingkat. Meski begitu, penelitian ini lebih menyoroti inovasi kebijakan dan teknologi, tidak secara langsung menganalisis kapasitas pengelolaan sumber daya lokal secara tradisional.
7	Lestari, E., & Putra, A.	2022	Penguatan untuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Untuk Peningkatan (PADes)	Penelitian ini memiliki kesamaan karena berfokus pada penguatan kapasitas aparatur desa dan pengelolaan aset (sumber daya) untuk peningkatan PADes. Perbedaannya adalah spesifik pada pengelolaan aset, sementara tema saya mencakup pengelolaan sumber daya lokal yang lebih luas (misalnya, alam, budaya).
8	Wibowo, H., & Nugroho, D.	2021	Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Guna Mendukung Pendapatan Asli Desa	Ada kesamaan karena membahas pemanfaatan sumber daya lokal dan dampaknya pada PADes.: Namun, penelitian ini lebih menekankan peran masyarakat daripada analisis kapasitas pemerintah desa secara langsung dalam pengelolaan sumber daya tersebut.
9	Fitriana, A., & Cahyani, P.	2020	Analisis Efektivitas Program Peningkatan Pendapatan Asli Desa Berbasis Pertanian di Desa	Penelitian ini relevan karena mengkaji efektivitas program PADes yang berbasis pada sumber daya lokal (pertanian). Meski begitu, penelitian ini terbatas pada sektor pertanian dan efektivitas program, tidak menganalisis kapasitas pemerintah desa secara komprehensif.
10	Pratama, Y., & Rahayu, S.	2019	Tantangan dan Peluang Pemerintah Desa dalam Menggali Potensi Lokal untuk Peningkatan PADes	Penelitian ini memiliki persamaan karena mengidentifikasi tantangan dan peluang pemerintah desa terkait potensi lokal dan PADes. Perbedaannya, penelitian ini cenderung lebih deskriptif

© Hak cipta milik UIN Suska Riau			mengenai tantangan dan peluang, belum tentu berupa analisis mendalam tentang kapasitas pemerintah desa dalam mengelola potensi tersebut.
----------------------------------	--	--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Definisi Konsep

Definisi konseptual dibuat untuk menghindari kesalahan pengertian dan tafsiran serta memudahkan penelitian, maka peneliti akan menguraikan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini :

a. Administrasi

Menurut Kamaruddin Sellang administrasi adalah proses pengorganisasian dan pengelolaan kerja sama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai ilmu, administrasi berkembang berdasarkan prinsip-prinsip universal, tetapi dalam praktiknya harus disesuaikan dengan konteks lokal. Terdapat tiga unsur pokok dalam administrasi: kerja sama yang melibatkan lebih dari satu individu, tujuan yang ingin dicapai, dan pengaturan yang sistematis. Administrasi melibatkan sejumlah fungsi utama, seperti penyusunan rencana, pengaturan struktur organisasi, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian atau pengawasan. Konsep ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah sosial, politik, dan ekonomi. Memiliki pemahaman yang mendalam mengenai administrasi merupakan hal yang krusial untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi maupun penyelenggaraan layanan publik.(Sellang 2019)

b. Kapasitas

UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1999 mendefinisikan Capacity building merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh individu, kelompok, organisasi, institusi, maupun masyarakat dalam menjalankan perannya, termasuk dalam mengatasi persoalan serta meraih tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemahaman ini, pembangunan kapasitas dapat dikaji melalui tiga level utama, yakni: level sistem, level organisasi, dan level individu. Ketiganya saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan yang erat. Klasifikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam proses analisis terhadap kapasitas yang dimaksud. Pada level sistem, kapasitas diukur dari terciptanya *lingkungan yang mendukung (enabling environment)*, yakni sejauh mana sistem mampu memberikan dukungan kepada komponen-komponen di dalamnya agar bisa berjalan secara optimal, efisien, serta berkelanjutan. Pada level organisasi atau institusi, fokus pengukuran kapasitas terletak pada berbagai faktor internal yang menunjang kinerja organisasi secara keseluruhan. Sedangkan di level individu, perhatian difokuskan pada kemampuan personal dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan lembaga atau organisasi.(Kanni 2009)

c. Keuangan desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa mencakup berbagai sumber pendapatan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Adapun sumber keuangan desa terdiri dari berbagai komponen yang penting untuk mendorong penciptaan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berikut adalah sumber-sumber keuangan desa menurut UU ini:

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:
 3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Dana Desa
 4. Bantuan Keuangan:
 5. Hibah dan Sumbangan:
- d. faktor pendukung dan penghambat dalam menghasilkan pendapatan asli desa dalam membentuk kemandirian keuangan desa terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat di dalam menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) Menurut Dr. Gunawan Sumodiningrat, Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat tumbuh secara signifikan apabila ekonomi lokal berbasis kerakyatan diperkuat melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif yang memanfaatkan sumber daya lokal, optimalisasi peran BUMDes dalam menjalankan roda perekonomian desa, serta kolaborasi dengan sektor swasta. Faktor pendukung utama meliputi keberadaan usaha berbasis potensi lokal, BUMDes yang aktif, dan kemitraan strategis yang mendatangkan manfaat ekonomi. Sebaliknya, hambatan dalam menghasilkan PADes sering kali disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pembinaan usaha, terbatasnya akses terhadap modal, dan rendahnya semangat wirausaha masyarakat desa (Gunawan Sumodiningrat 2007)

©
Pakar
Analisis
Kepentingan
Pengembangan
Desa

2.5 Konsep Oprasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Analisis kapsitas pemerintah desa dalam menghasilkan pendapatan asli desa PADes melalui pengelolaan sumber daya lokal (menurut INDP, 2009)	1. Tingkat Sistem	a. Adanya regulasi yang mendukung b. Alokasi sumber daya yang memadai
	2. Tingkat Organisasi	a. Struktur organisasi b. Pengembangan SDM
	3. Tingkat Individu	a. Tingkat Pendidikan b. Keterampilan Teknis
Faktor pendukung & penghambat dalam menghasilkan pendapatan asli desa (Menurut Dr. Gunawan Sumodiningrat, 2007)	1. Usaha berbasis potensi lokal	a. Jumlah usaha b. Kontribusi usaha terhadap PADes
	2. Keaktifan BUMDes	a. Jumlah unit usaha BUMdes b. Jumlah tenaga kerja lokal
	3. Kolaborasi dengan Pihak Swasta	a. Jumlah kerjasama resmi dengan swasta b. Nilai investasi yang masuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	4. keterbatasan internal masyarakat	a. Jumlah usaha / pelatihan yang di ikuti masyarakat b. Keberlanjutan usaha masyarakat
	5. Akses terhadap Modal Usaha	a. Sumber pendanaan modal b. Rata-rata nilai pinjaman yang di salurkan
	6. Semangat / Inisiatif Usaha Masyarakat	a. Keikitsertaan masyarakat dalam menghasilkan PADes
	7. Akses Pasar	a. persaingan dengan sproduk luar desa b. akses ke kota

Sumber: teori capacity building UNDP, Dr. Gunawan Sumodiningrat faktor pendukung dan penghambat dalam menghasilkan PADes

Menurut Sugiyono (2017), kerangka pemikiran dapat dipahami sebagai suatu model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori dengan berbagai variabel yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari isu penting dalam penelitian. Dengan merujuk pada dasar-dasar teori yang diperoleh melalui eksplorasi literatur yang relevan dan digunakan sebagai acuan konseptual, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

© **2.6. Krangka Berfikir**

Analisis Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Menghasilkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Melalui Pengelolaan Sumber Daya Lokal Di Desa Bagan Melibur Kabupaten Kepulauan Meranti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif atau yang biasa disebut dengan metode kualitatif karena kualitatif menyediakan landasan bagi pemaparan yang lebih luas serta penelitian kualitatif berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial berdasarkan fakta (Sutinah, 2015). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam dan luas terhadap fenomena sosial berdasarkan fakta nyata, dengan data berupa kata, kalimat, skema, dan gambar yang kaya konteks. Metode ini sesuai untuk penelitian ini karena fokus pada makna, proses, dan konteks sosial yang kompleks, sehingga dapat mengungkap bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi secara ideografis.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di kabupaten kepulauan meranti bertepatan dikantor desa bagan melibur yang beralamat di Jl. Utama, kecamatan merbau, kabupaten kepulauan meranti, kode pos 28752. Desa ini di pilih berdasarkan pertimbangan geografis yang lebih dekat sehingga memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi serta data-data yang di perlukan terkait penelitian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian haruslah mengetahui kita memakai sumber data dan jenis data apa dalam menyelesaikan penelitian kita mana ada beberapa sumber data dan jenis jenis data dalam melakukan suatu penelitian sebagai berikut Suimbeir data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua suimbeir data, yaitu

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan digunakan sebagai bahan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. (Adhi Kusumastuti, 2019). Pengumpulan data ini dilakukan melalui kegiatan observasi di lapangan serta wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai sampel dan dianggap memiliki kapasitas yang relevan dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dapat direkam atau dicatat secara langsung oleh peneliti, kemudian disusun dalam bentuk transkrip atau narasi hasil wawancara dengan para informan. pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara langsung dengan informan relevan untuk penelitian ini karena memungkinkan memperoleh informasi asli dan mendalam yang langsung terkait dengan topik penelitian dengan informan yang memiliki kapasitas di bidang tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung informasi primer, karena data ini diperoleh peneliti melalui sumber-sumber yang telah ada. Maksudnya ialah data ini dapat diperoleh melalui buku, literatur,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu, bahan pustaka dan sebagainya. Sehingga data ini tidak langsung didapatkan dari narasumber atau informan yang diteliti melainkan data ini diperoleh peneliti dari data yang telah ada. Data ini bersumber dari artikel, berita media masa, laporan arsip tahunan, studi literatur. (Sugiyono 2017) dalam penelitian ini tentunya membutuhkan data keuangan desa, bumdes, potensi desa, data PADes, program kerja pemerintah desa yang akan menjadi sarana pendukung atau penguatan atas informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. wawancara juga diartikan dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Ciri utama dari wawancara yaitu adanya kontak langsung dengan cara tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interview) untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif (Syarif et al., 2013). Dengan demikian, posisi peneliti disini ialah sebagai pencari informasi (interviewer) yang meminta penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur. Pada jenis wawancara ini, daftar pertanyaan beserta pilihan jawaban yang akan diberikan kepada narasumber telah disusun dan ditentukan sebelumnya oleh peneliti. (Syarif et al., 2013). Maka dari itu sebelum melakukan wawancara dengan interview maka peneliti menyiapkan draf pertanyaan terlebih dahulu yang telah direncanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempermudah proses jalan nya wewancara serta informasi bisa di dapatkan secara lengkap.

2. Observasi Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan teknik lainnya seperti wawancara atau kuesioner. Teknik ini tidak terbatas pada komunikasi langsung dengan manusia, namun juga dapat digunakan untuk mengamati objek-objek alam dan fenomena lainnya. Observasi adalah proses yang kompleks karena melibatkan berbagai unsur biologis dan psikologis. Dua aspek penting dalam proses observasi adalah pengamatan dan ingatan (Sugiyono, 2020). Oleh karena itu, observasi sangat cocok digunakan untuk penelitian ini di mana penelitian ini berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, atau gejala-gejala alam yang tidak dapat direkam secara langsung oleh responden namun bisa dilakukan pengamatan terhadap objek tersebut.
3. Dokumentasi Menurut Suharsini Arikunto, dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Sugiyono, 2020). Dokumentasi ini berarti peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notula rapat, catatan harian, dan sebagainya yang sesuai dengan penelitian penulis.

3.5 Informan Penelitian

Adapun sumber data yang paling utama ialah dari informan. Informan berperan penting sebagai sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan situasi penelitian (Moleong, 2011). Informan yang nantinya akan memberikan informasi kepada peneliti ialah orang yang dianggap kompeten.

No.	Informan penelitian	Jumlah
1.	Kepala desa	1
2.	Kepala urusan perencanaan	1
3.	Kepala urusan keuangan	1
4.	Badan pengawas desa	1
5.	Ketua BUMDES	1
6.	Kepala dusun	2
	Masyarakat	3
	Pihak Swasta	1
	Jumlah	11

Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada peran strategis masing-masing pihak dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat desa. Kepala Desa dipilih sebagai informan utama karena posisinya sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan serta menjadi tolok ukur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menilai keberhasilan pembangunan desa. Kepala Urusan Keuangan dipilih karena memiliki pemahaman yang komprehensif terkait pengelolaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selanjutnya, Kepala Urusan Perencanaan dilibatkan karena memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perumusan dan penyusunan program-program kerja di Desa Bagan Melibur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sementara itu, Badan Pengawas Desa dijadikan informan karena fungsinya yang berkaitan langsung dengan pengawasan atas pelaksanaan program-program desa, baik yang telah berhasil maupun yang belum. Kepala dusun dipilih karena dianggap sebagai wakil masyarakat yang dipercaya oleh kepala desa untuk menyampaikan serta menyosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pihak di pilih karna turut mendukung dalam menghasilkan salah satu instrumen keuangan di Desa Bagan Melibur. Terakhir, warga desa dilibatkan sebagai informan karena mereka merupakan pihak yang secara langsung mengalami dampak dari kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa, sehingga mereka dapat memberikan informasi apakah program tersebut benar-benar terlaksana atau tidak.

3.6 Teknik Analisi Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020) Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang dijalankan melalui empat tahapan pokok

Antara lain:

1. Pengumpulan Data Peneliti memperoleh data melalui wawancara secara lisan yang direkam lalu dituangkan menjadi catatan-catatan wawancara antara peneliti dengan narasumber kemudian dokumentasi berupa dokumen dokumen. Kemudian data yang dihasilkan dari penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti.
2. Reduksi Data Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2020) Setelah data yang diperoleh peneliti dikumpulkan selanjutnya peneliti melakukan penyeleksian atau menyederhanakan data yang diperoleh sehingga data tersebut akan difokuskan sesuai dengan arah penelitian yang telah ditetapkan.
3. Penyajian data bertujuan untuk menggambarkan secara tepat hasil data yang telah didapatkan melalui proses reduksi sebelumnya, sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau format lainnya. Namun, bentuk penyajian yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah melalui narasi teks atau paparan deskriptif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Sejarah Desa Bagan Melibur**

Desa Bagan Melibur terletak di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, dan wilayahnya terdiri dari berbagai dusun beserta unit RT serta RW di dalamnya. Masa pra-kemerdekaan Indonesia, tepatnya sebelum 1945, tempat ini masih berupa permukiman sederhana yang didiami segelintir keluarga migran dari Jawa, termasuk tokoh-tokoh seperti mendiang Bariddin, Usup, Atmo, Sambio, Sarju, serta yang lainnya. Lambat laun, warga-warga itu memulai pembukaan lahan guna dibuat kebun-kebun pertanian.

Awal mula pembentukannya, desa ini sempat disebut sebagai Desa Persiapan, yang dipimpin oleh mendiang Pak Umar asal Kelurahan Teluk Belitung. Sementara itu, Bapak Safi'i Jais menjabat sebagai camat pertama di wilayah tersebut. Pada 1980, terjadi pemekaran oleh Camat Merbau, sehingga namanya berubah menjadi Desa Muda Bagan Melibur. Resmi dilantik pada 3 Juli 1980 oleh Camat Merbau, dengan Bapak H. Paimin bin H. Kartosenen memimpin sebagai kepala desa awal. Hingga 1991, statusnya masih disebut Desa Finitif, baru setelah itu dari 1991 sampai 2000, ia diakui penuh sebagai Desa Bagan Melibur.

Proses pemilihan kepala desa dimulai pada masa 2001-2005, di mana Bapak H. Imam Sudayat terpilih untuk satu kali periode. Lalu, giliran Bapak Azra'i Jamil yang menang pada 2006-2008, meski sayangnya beliau wafat setelah barunya setahun menjabat, sehingga digelar pilkades ulang. Hasilnya, Bapak Samaun,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

S.Sos, memegang amanah dari 2008 hingga 2012. Selepas satu periode, pemilihan digelar lagi di 2013.

Tahun 2012 menjadi momen penting ketika desa ini terbelah menjadi dua entitas: Desa Bagan Melibur dan Desa Mayang Sari. Untuk Desa Bagan Melibur, pilkades 2013 dimenangi oleh Bapak Drs. Komari, yang menjabat sampai 2019. Pasca-berakhirnya masa itu, pemilihan baru menghasilkan Bapak Isnadi Esman, S.Pd, sebagai pemimpin untuk periode 2019 hingga 2025.

Adapun rangkaian kepala desa Desa Bagan Melibur sejak awal berdiri hingga kini adalah sebagai berikut:

1. H. Imam Sudayat, Menjabat pada tahun 2000-2005
2. Azra'i Jamil, Menjabat pada tahun 2006-2007
3. Jasri, Menjabat pada tahun 2007
4. Samaun S.Sos, Menjabat pada tahun 2008-2012
5. Drs. Komari, Menjabat pada tahun 2013-2019
6. Wan Minarni, Menjabat pada tahun 2019
7. Isnadi Esman, Menjabat sejak tahun 2019- Hingga saat ini

4.2 Visi Dan Misi Desa Bagan Melibur

a. Visi Desa Bagan Melibur

“Terbangunnya Silaturahmi Yang Bersinergi Dalam Membangun Desa Bagan Melibur Yangmandiri Dan Sejahtera”

b. Misi Desa Bagan Melibur

- a. Peningkatan pelayanan publik berdasarkan kinerja aparatur desa yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan pemerataan pembangunan sarana prasarana yang berlandaskan kebutuhan dan peran serta masyarakat.
- c. Memfasilitasi penguatan kelembagaan di bidang keagamaan, pendidikan, dan keahlian, serta perekonomian masyarakat (UMKM. Pertanian, Peternakan, Perikanan dan nelayan)
- d. Mendorong peran dunia usaha yang berkontribusi dalam pembangunan desa dan lapangan pekerjaan.
- e. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai sosial, adat istiadat, seni budaya dalam kehidupan masyarakat.
- f. Mensinergikan peran kepemudaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.
- g. Mengalakaan keamanan, kebersihan desa dan perlindungan lingkungan hidup.

4.3 Letak Geografi Desa Bagan Melibur

Desa Bagan Melibur berada di kawasan pantai Pulau Merbau, tepatnya di bawah wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Wilayahnya mencakup luas sekitar 47,404 kilometer persegi, dengan mayoritas daratan yang didominasi oleh jenis tanah gambut yang mencapai kedalaman hingga delapan meter. Secara posisi, desa ini berada di antara area Kecamatan Merbau dan Pulau Merbau itu sendiri, yang secara alami memisahkan kedua wilayah tersebut.

Adapun batas-batas wilayah Desa Bagan Melibur dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bagian utara bersinggungan dengan Desa Mayang Sari.

- © **Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- b. Di sisi selatan, desa ini berdekatan dengan Selat Asam serta Kelurahan Teluk Belitung.
 - c. Sebelah baratnya, batasnya adalah Desa Lukit.
 - d. Sementara itu, wilayah timur berbatasan langsung dengan Kelurahan Teluk Belitung.

Dari segi aksesibilitas, kantor pemerintahan desa berjarak hanya satu kilometer atau sekitar sepuluh menit perjalanan dari pusat Kecamatan Merbau. Sementara itu, untuk mencapai ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti, diperlukan perjalanan sejauh 48 kilometer yang memakan waktu sekitar dua jam. Dalam struktur administratifnya, Desa Bagan Melibur dibagi menjadi empat dusun, empat rukun warga (RW), serta 12 rukun tetangga (RT).

4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk

4.4.1 Jumlah Penduduk

Berdasarkan data administratif pemerintah desa bagan melibur adapun jumlah penduduk di desa tersebut sebanyak, 2.440 jiwa, yang terdiri dari 1.241 jiwa laki-laki dan 1.199 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rincian lebih detail mengenai distribusi penduduk ini bisa diamati pada tabel yang disajikan di bawah ini.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – laki	1.241
2.	Perempuan	1.199
	Jumlah	2.440

Sumber : Desa Bagan Melibur Tahun Tahun 2025

Tabel 4. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Di Desa Bagan Melibur

No	Usia	Jumlah (Orang)
1.	0-4 Tahun	221
2.	5-9 Tahun	214
3.	10-14 Tahun	199
4.	15-19 Tahun	194
5.	20-24 Tahun	216
6.	25-29 Tahun	215
7.	30-34 Tahun	208
8.	35-39 Tahun	187
9.	40-44 Tahun	167
10.	45-49 Tahun	154
11.	50-54 Tahun	144
12.	55-60 Tahun	117
13.	Lansia	205
Total		2.441

Sumber : Desa Bagan Melibur Tahun Tahun 2025|

4.5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bagan Melibur

Berdasarkan survei yang di lakukan dari total 2.440 jiwa penduduk Desa Bagan Melibur, tingkat pendidikan secara keseluruhan masih didominasi oleh pendidikan dasar, di mana sekitar 45% warga hanya menyelesaikan SD atau setara, diikuti 30% yang tamat SMP, 15% mencapai SMA atau kejuruan, serta 10% yang memiliki pendidikan diploma atau sarjana. Pola ini mencerminkan tantangan aksesibilitas sekolah di wilayah pesisir kepulauan, di mana faktor ekonomi seperti pekerjaan nelayan dan petani sering kali membatasi kelanjutan pendidikan, terutama pada kalangan laki-laki, sementara perempuan menunjukkan proporsi lebih seimbang di tingkat menengah pertama meski tetap terhambat oleh norma budaya lokal. Meskipun demikian, masih terdapat penduduk yang belum mengenyam pendidikan formal sama sekali, yang menjadi isu krusial dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia desa.

Berikut disajikan rincian tingkat pendidikan penduduk berdasarkan data dari Kantor Desa Bagan Melibur tahun 2025, yang mencakup distribusi berdasarkan lembaga pendidikan terakhir yang dicapai. Total penduduk tercatat sebanyak 2.441 jiwa, dengan proporsi signifikan pada tingkat dasar dan menengah.

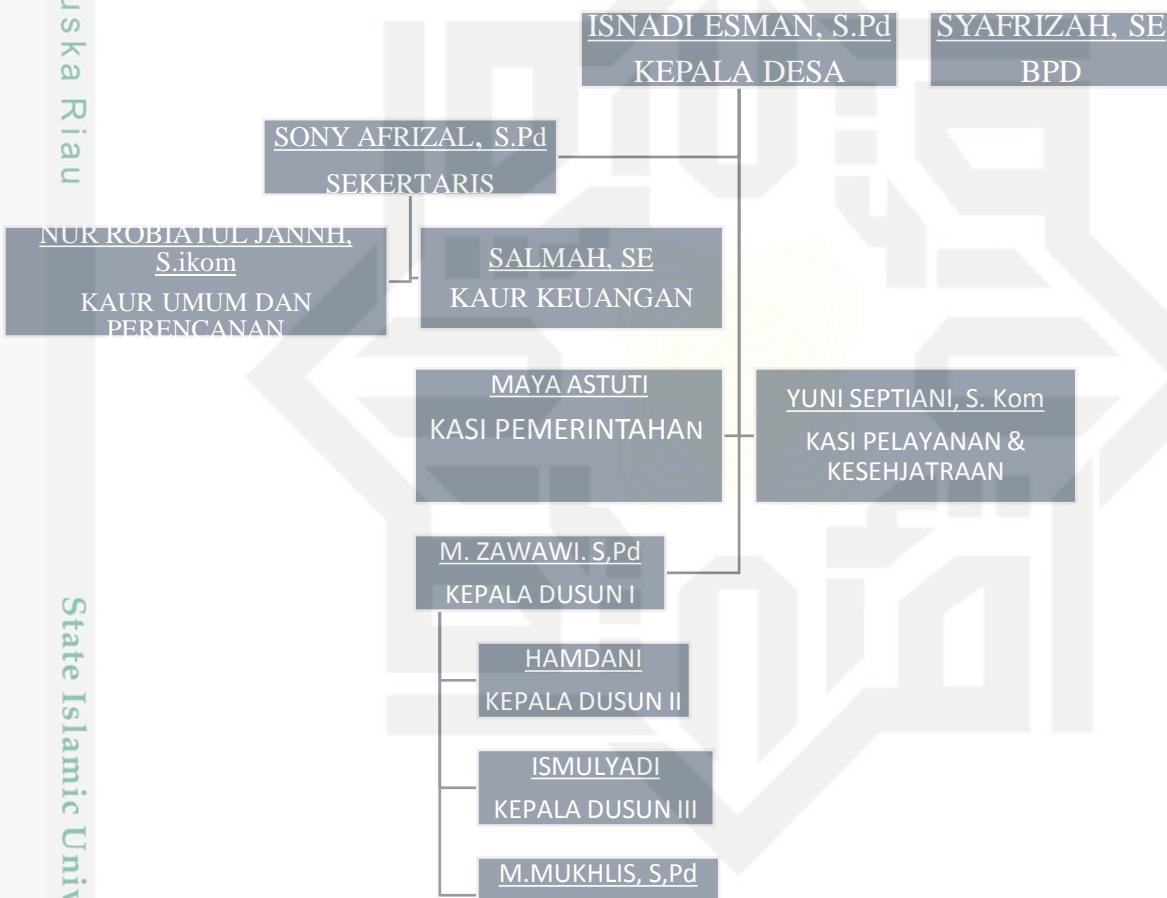
Tabel 4. 3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bagan Melibur

Pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat Sekolah	363 Orang
Belum Sekolah	23 Orang
Tamat SD/Sederajat	632 Orang
Tamat SLTP/Sederajat	457 Orang

NO	Pendidikan	Jumlah	
Tamat SLTA/Sederajat		676 Orang	
Tamat Perguruan Tinggi		285 Orang	
Buta Huruf		5 Orang	
Total		2.441 Orang	

Sumber : Desa Bagan Melibur Tahun Tahun 2025

4.6 Struktur Organisasi Desa Bagan Melibur



Berdasarkan gambaran struktur organisasi diatas setiap orang memiliki bagian dan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai dengan jabatan yang dimiliki, Adapun spesifikasi tugas perangkat desa di atas adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik INNUSKA RIAU**1. Kepala Desa**

Dalam peran sebagai pemimpin eksekutif desa, Kepala Desa bertanggung jawab atas koordinasi dan pelaksanaan program pembangunan, di mana ia mengarahkan sumber daya untuk mengatasi tantangan lokal seperti peningkatan akses layanan dasar atau pengembangan ekonomi, melalui proses pengambilan keputusan yang strategis dan kolaboratif, sehingga membangun sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai stabilitas sosial dan kemajuan berkelanjutan di wilayahnya.

2. Badan Pengawas Desa (BPD)

BPD berfungsi sebagai wadah deliberatif yang mengumpulkan suara masyarakat untuk membentuk kerangka kebijakan lokal, di mana anggota aktif terlibat dalam diskusi mendalam guna menangani isu-isu seperti pengelolaan sumber daya atau resolusi konflik, sehingga memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan kebutuhan komunitas secara holistik dan berkelanjutan, dengan pendekatan yang menekankan keterlibatan inklusif untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan tingkat bawah.

3. Sekertaris

Sekretaris Desa berperan sebagai penopang administrasi harian yang mengelola dokumen dan komunikasi internal, di mana tugas utamanya melibatkan penyusunan laporan serta fasilitasi koordinasi antar elemen desa, guna memastikan kelancaran operasional seperti pemrosesan permohonan warga atau dukungan terhadap inisiatif pembangunan, dengan pendekatan yang teliti untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola lokal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kaur Keuangan

Kaur keuangan Desa menangani aspek keuangan desa dengan ketelitian, termasuk pengelolaan anggaran dan pelaporan dana, di mana peran ini mencakup pemantauan alokasi sumber daya untuk program seperti bantuan sosial atau infrastruktur, sehingga menjaga integritas keuangan dan mencegah penyalahgunaan, melalui praktik yang disiplin untuk mendukung kestabilan ekonomi desa secara keseluruhan.

5. Kaur Umum & Perencanaan

Kepala Urusan Umum (Kaur Umum) bertanggung jawab atas pengelolaan operasional harian seperti administrasi, pengadaan logistik, dan pemeliharaan fasilitas umum untuk memastikan efisiensi kegiatan desa, sementara Kepala Urusan Perencanaan (Kaur Perencanaan) fokus pada penyusunan strategi pembangunan jangka panjang melalui analisis kebutuhan masyarakat dan integrasi program lokal dengan prioritas nasional, sehingga kedua peran ini saling melengkapi untuk memperkuat tata kelola desa yang responsif, berkelanjutan, dan inklusif terhadap tantangan sosial-ekonomi.

6. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mengawasi aspek regulasi dan koordinasi pemerintahan desa, termasuk pemantauan pelaksanaan aturan serta interaksi dengan instansi luar, di mana tugas ini melibatkan penguatan tata kelola melalui evaluasi program pemerintahan, guna menjamin kepatuhan terhadap standar hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses administratif yang lebih responsif dan efektif.

©

7. Kasi Pelayanan & Kesehjatraan

Kepala Seksi Pelayanan bertanggung jawab atas penyediaan layanan langsung kepada masyarakat, termasuk koordinasi administrasi sehari-hari, pemrosesan permohonan warga, dan pemastian akses layanan publik yang efisien, sehingga mendukung kelancaran operasional desa dan peningkatan partisipasi komunitas dalam pembangunan lokal yang inklusif. Sedangkan Kepala Seksi Kesejahteraan fokus pada pengelolaan program kesejahteraan sosial, seperti identifikasi kebutuhan kesehatan dan pendidikan serta pelaksanaan inisiatif pengurangan ketimpangan, guna menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sejahtera dan resilient melalui pendekatan strategis yang berorientasi pada keberlanjutan

8. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertindak sebagai perwakilan langsung masyarakat di unit terkecil desa, dengan tugas utama mengelola koordinasi lokal seperti pemantauan kondisi sosial-ekonomi, fasilitasi kegiatan gotong royong, dan pelaporan isu-isu keatas, sehingga memastikan bahwa program desa diterapkan secara tepat dan inklusif, melalui pendekatan yang mendalam dalam membina hubungan antarwarga serta menangani tantangan sehari-hari seperti konflik atau bantuan darurat, memperkuat pondasi demokrasi lokal dan resiliensi komunitas terhadap perubahan eksternal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V I**KESIMPULAN DAN SARAN****6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, kapasitas Pemerintah Desa Bagan Melibur dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dilihat dari dimensi teori yang digunakan dengan adanya regulasi yang mengatur, struktur organisasi yang teratur, serta kompetensi aparatur yang memadai. Desa mampu mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel melalui perencanaan yang partisipatif, sistem administrasi digital, serta alokasi anggaran yang tepat, termasuk dana dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan khusus, dan kerja sama konsesi dengan pihak swasta seperti PT RAPP. Keberadaan aparatur yang terlatih dan berpendidikan tinggi memungkinkan desa mengoptimalkan pengelolaan keuangan, aset, dan usaha lokal. Namun dalam hal menghasilkan PADes berbasis pada sumber daya lokal hal tersebut belum dilakukan secara optimal di mana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sumber utama PADes di desa tersebut masih sepenuhnya bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak ketiga dimana belum ada usaha berkelanjutan yang mampu untuk berkontribusi langsung terhadap PADes.

Faktor pendukung utama dalam meningkatkan PADes adalah pemanfaatan potensi lokal melalui BUMDes, seperti usaha pakan ternak dan ketahanan pangan berbasis produk lokal, serta kerja sama konsesi yang memberikan kontribusi tetap terhadap pendapatan desa. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan partisipasi masyarakat, keterampilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewirausahaan yang masih rendah, bahan baku yang kian naik, serta tantangan akses pasar dan letak geografisnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran perbaikan untuk Desa Bagan Melibur adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas desa dalam menghasilkan PADes dipengaruhi oleh regulasi, struktur organisasi, dan kemampuan aparatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih memperkuat penggunaan teori kapasitas UNDP sebagai kerangka analisis. Selain itu, peneliti lain dapat menggabungkan teori ekonomi kerakyatan atau teori pembangunan lokal agar pemahaman tentang bagaimana desa memanfaatkan potensi lokal menjadi lebih menyeluruh. Penelitian perbandingan antar desa juga perlu dilakukan untuk melihat apakah hasil yang sama berlaku di desa lain.

2. Praktis (pemerintah desa)

1. Meningkatkan pengelolaan PADes berbasis potensi lokal, bukan hanya mengandalkan kerja sama pihak ketiga.
2. Mendorong pelatihan dan peningkatan keterampilan aparatur desa, terutama dalam kewirausahaan, pengelolaan aset, dan penggunaan teknologi digital.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memperkuat partisipasi masyarakat melalui musyawarah yang lebih aktif dan pemberdayaan kelompok usaha lokal
4. Mengembangkan perencanaan yang lebih berkelanjutan, terutama untuk usaha desa yang bisa menghasilkan pendapatan jangka panjang.
3. Peneliti selanjutnya
 1. Meneliti lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan BUMDes dalam menghasilkan PADes.
 2. Melakukan penelitian di beberapa desa lain untuk membandingkan cara mereka meningkatkan PADes, sehingga hasil penelitian lebih lengkap dan mudah diterapkan secara umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, Iwan Henriyadi. 2023. Administrasi Negara Publik *Teori Administrasi Publik Pengantar*.
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=vPsAEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+publik&ots=7fIw0Mdhz2&sig=tqEnZEmO8ftIL4Tux6m4OWTOat8>.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard University Press.
- Kanni, Wignaraja. 2009. “Capacity Development: A UNDP Primer.” *Undp*: 64. <http://www.undp.org/capacity>.
- Menyeri Dalam Negeri. 2013. “Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.” : 1–4. <https://www.kemendagri.go.id/>.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. ke-38). Remaja Rosdakarya.
- Sellang, Kamaruddin. 2019. “ADMINISTRASI DAN PELAYANAN PUBLIK Antara Teori dan Aplikasinya.” *Ombak* (February): 1–229.
- Salahudin. 2016. “Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government ...” (September).
- Sumodiningrat, G. (2007). *Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutinah. (2015). *Metode penelitian tindakan*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. ke-25). Alfabeta.
- Syarif, A., Purba, R., & Humaedi, S. (2013). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Warsono, Hardi, Retno Sunu Astuti, dan Aufarul Marom. 2019. “Buku Ajar Teori Administrasi.” *Ilmu Administrasi dan Ilmu Administrasi Negara*:

Jurnal

- Cisan, Nur, Imran Kurman, Dody Setyawan, Noora Fithriana, Program Studi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Administrasi Publik, dan Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 2021. "2361-3439-2-Pb (1)." 10(3): 232–37.
- Desiwantara, D., Effendy, K., Madjid, U., & Kawuryan, M. W. (2024). Model pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Inovasi: *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 17(4).
- Desiwantara, A., Rahmawati, N., & Prasetyo, D. (2024). Peran Modal Usaha dan Tata Kelola BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Desa*, 5(1), 45–58.
- Fitriana, Rahayu. 2014. "Implementasi administrasi pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan di desa kanonang dua kecamatan kawangoan barat kabupaten minahasa): 1–17.
- Fitriana, A., & Cahyani, P. (2020). Analisis efektivitas program peningkatan Pendapatan Asli Desa berbasis pertanian di desa. *Jurnal Agribisnis dan Pembangunan Lokal*, 4(1), 71–82.
- Gundul, P. (2025). Village financial transparency: Evaluation of the implementation of the village financial system in improving accountability in village fund management. *Journal of Strategic Behaviour Accounting*, 1(1), 1–15.
- Hardiana, Seri Fhathul, Adam Idris, dan Melati Dama. 2018. "Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Di Desa Mansalong Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan." *eJournal Ilmu Pemerintahan* 6(2): 931–44.
- Hartono, R., & Supriyanto, T. (2023). Dampak inovasi kebijakan lokal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di era digital. *Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah*, 11(1), 33–47.
- Haris, U., Kontu, F., Syahruddin, S., Oja, H., & Rachmawati, D. (2025). Peningkatan kapasitas aparatur kampung dalam pengelolaan dana desa di Kampung Wasur Distrik Merauke melalui pendidikan dan pelatihan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(3), 1–10.
- Indrawati, R., & Susilo, J. (2020). Identifikasi potensi ekonomi lokal dan implikasinya terhadap kemandirian desa di Kabupaten Y. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(2), 55–70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kurniawan, D., & Suryono, A. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, **10**(2), 101–114.
- Khairina, D. R., Wanusmawatie, I., & Permadi, W. K. (2025). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa (systematic literature review pada penerapan society centered approach dalam pengembangan Bumdes). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, **9**(2), 22645–22653.
- Losung, D H, H R N Wokas, D Afandi, Analisis Perencanaan, D A N Pertanggungjawaban, Dealita Hanna Losung, Heince R N Wokas, et al. “Keuangan Desa Di Desa Molompar Atas Kecamatan Tombatu Timur Analysis Of Planning And Accountability Of Village Financial Management In Molompar Atas Village , East Tombatu District Jurnal Emba Vol . 12 No . 3 Juli 2024 , Hal . 977-986.” **12**(3): 977–86.
- Lestari, E., & Putra, A. (2022). Penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan aset desa untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Tata Kelola Desa*, **6**(2), 66–78.
- Madyan, Muhammad, Gigih Prihantono, dan Ratri Amelia Aisyah. 2020. “Governance in a village fund program in East Java Indonesia.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change* **11**(11): 344–65.
- Nugraha, H., & Makmur. (2025). Strategi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan di Desa Jati Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, **6**(1).
- Oktavia, T. A., & Nurasa, H. (2024). Kapasitas organisasi pemerintahan desa. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, **5**(2), 1–15.
- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, **1**(1), 23–33. Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbasis potensi lokal sebagai penggerak ekonomi desa. *Journal of Economics and Policy Studies (JEPS)*, **1**(1), 23–33.
- Putra, R. A., & Pratiwi, D. E. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, **6**(2), 145–156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- pawitan, G., Lesmono, D., Aritonang, N., & Diyanah, M. C. (2025). Empowering Rural Communities through Strengthening Village-Owned Enterprises (BUMDes) for Sustainable Socioeconomic Development: A Case Study of Mekarsari Village, Garut Regency. *Society*, 13(1), 256–274.
- Putra, I. R. A. S., Wibowo, R. A., Purwadi, Andari, T., Asrori, Christy, N. N. A., Santoso, C. W. B., Harefa, H. Y., & Suryawardana, E. (2025). Village-Owned Enterprises Perspectives Towards Challenges and Opportunities in Rural Entrepreneurship: A Qualitative Study with Maxqda Tools. *Administrative Sciences*, 15(3), 74.
- Pratama, Y., & Rahayu, S. (2019). Tantangan dan peluang pemerintah desa dalam menggali potensi lokal untuk peningkatan PADes. *Jurnal Pembangunan dan Otonomi Daerah*, 3(2), 90–102.
- Rasmala, K., & Mursak, Mursak. 2014. “Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Sinjai.” *Jurnal Ilmiah*
- Ramadhan, S., & Sudaryanto, A. (2023). Strategi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui optimalisasi potensi lokal di desa. *Jurnal Pembangunan dan Pemerintahan Desa*, 12(1), 45–56.
- Ridlwan, A., & Suryani, T. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa berbasis potensi lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 115–128.
- Santoso, B., & Cahyono, E. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan sektor pariwisata untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 87–98.
- Setyawati, A. H., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2022). Pengaruh alokasi dana desa, potensi desa, dan kinerja pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 939–950.
- Saputra, D., & Hidayat, A. (2021). Pengembangan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Desa untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Desa*, 3(1), 50–62.
- Utami, L., & Wijoyo, S. (2019). Analisis kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 120–134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ultari, T., & Khoirunurrofik, K. (2024). The role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in village development: Empirical evidence from villages in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 8(2), 256–280.

Vinoli, S., & Wisesa, W. V. A. (2025). Evaluating the role of village-owned enterprise (BUMDes) in contributing to village independent revenue (PADes): Case study of Benteng Gajah Village. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 8(4)

Wibowo, H., & Nugroho, D. (2021). Optimalisasi peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal guna mendukung Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Partisipasi dan Pembangunan*, 5(3), 22–36.

Undang-undang

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI. <https://peraturan.bpk.go.id>

**Lampiran 1****PEDOMAN WAWANCARA****ANALISIS KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM
MENGHASILAKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADes) MELALUI
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DI DESA BAGAN MELIBUR
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Teori	Indikator	Pertanyaan
Kapsitas (UNDP)	Tingkat sistem	<ul style="list-style-type: none">a. Adanya Regulasi yang Mendukungb. Apakah terdapat peraturan atau kebijakan desa yang mengatur pengelolaan sumber daya lokal untuk peningkatan PADes?c. Sejauh mana regulasi tersebut diterapkan dan mendukung upaya peningkatan PADes di Desa Bagan Melibur?d. Alokasi Sumber Daya yang Memadaie. Bagaimana pengalokasian anggaran desa dalam mendukung pengelolaan sumber daya lokal?f. Apakah sumber daya yang tersedia (keuangan, manusia, material) sudah cukup untuk meningkatkan PADes?
	Tingkat Organisasi	<ul style="list-style-type: none">a. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab dalam instansi ini?b. Apakah struktur organisasi yang ada sudah efektif dalam mendukung?c. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengembangkan kapasitas dan kompetensi aparatur desa agar mampu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



		mengelola potensi ekonomi lokal secara efektif untuk meningkatkan PADes?
© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Tingkat Individu	<ul style="list-style-type: none">a. Bagaimana latar belakang pendidikan dan pelatihan perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan PADes?b. Sejauh mana pelatihan yang pernah diikuti membantu peningkatan kapasitas dalam mengelola PADes?c. Apakah perangkat desa memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam bekerja?
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Faktor pendukung dan penghambat (Dr.gunawan sumodiningrat)	<ul style="list-style-type: none">a. Apa saja jenis usaha yang saat ini dikembangkan di Desa Bagan Melibur berdasarkan potensi sumber daya lokal?b. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendorong munculnya usaha-usaha baru berbasis potensi lokal?c. Sejauh mana usaha berbasis potensi lokal berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)?d. Apa upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kontribusi usaha lokal terhadap PADes?
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Keaktifan BUMDes	<ul style="list-style-type: none">a. Berapa unit usaha BUMDes yang masih aktif dan produktif hingga saat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>ini?</p> <p>b. Faktor apa yang mempengaruhi keberlanjutan aktivitas usaha BUMDes di desa ini?</p> <p>c. Seberapa besar penyerapan tenaga kerja lokal oleh BUMDes?</p> <p>d. Apakah BUMDes memberi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja?</p>
	Kolaborasi dengan Pihak Swasta	<p>a. Apakah perusahaan memiliki kerja sama dengan pemerintah desa atau BUMDes di Desa Bagan Melibur?</p> <p>b. Bagaimana bentuk dan manfaat kerja sama tersebut terhadap peningkatan PADes?</p> <p>c. Apa bentuk dukungan atau kontribusi pihak swasta dalam mengembangkan potensi lokal desa?</p>
	Keterbatasan Internal Masyarakat Desa	<p>a. Seberapa sering masyarakat desa mendapatkan pelatihan/pendampingan dalam mengembangkan usaha lokal?</p> <p>b. Bagaimana hasil dari pelatihan tersebut terhadap peningkatan kemampuan masyarakat dalam berusaha?</p> <p>c. Bagaimana tingkat keberlanjutan usaha kecil di desa (apakah banyak usaha yang bertahan dalam jangka waktu lama)?</p>



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Akses terhadap Modal Usaha	<ol style="list-style-type: none">Bagaimana akses masyarakat terhadap program pinjaman atau kredit usaha produktif?Apakah pemerintah desa memiliki peran dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh modal usaha?Seberapa besar rata-rata modal yang diperoleh pelaku usaha desa untuk mengembangkan usahanya?
	Semangat / Inisiatif Usaha Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung peningkatan PADes?Apa bentuk inisiatif masyarakat yang paling menonjol dalam memanfaatkan potensi lokal?
	Akses Pasar	<ol style="list-style-type: none">Persaingan dengan produk luar desa/luar daerahBagaimana tingkat persaingan produk lokal desa dengan produk dari luar daerah?Apa strategi desa dalam mempertahankan daya saing produk lokal di pasar?Apa yang menjadi kendala dalam melakukan pemasaran ?Seberapa mudah produk lokal desa dijual atau didistribusikan ke pasar di luar desa?

© **Lampiran 2**

DOKUMENTASI



BUMDES Ketahanan Pangan Pisang

BUMDES Pakan Ternak Sapuring



**Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa
Bagan Melibur**

Aset Desa Bagan Melibur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Wawancara Bersama Bendahara Desa Bagan Melibur



Foto Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bagan Melibur



Foto Wawancara Bersama Kasi Perencanaan Desa Bagan Melibur



Foto Wawancara Bersama Kepala Desa Bagan Melibur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Wawancara Bersama Kadus II
Desa Bagan Melibur



Foto Wawancara Bersama BPD Desa
Bagan Melibur



Foto Wawancara Bersama Pengurus
BUMDES Desa Bagan Melibur



Foto Wawancara Bersama Pihak
RAPP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Foto Wawancara Bersama Masyarakat Desa Bagan Melibur